

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR

2.1 Penelitian Terdahulu

Studi ini mengkaji tentang Sosialisasi Empat Pilar MPR RI oleh DPR RI di daerah pemilihan. Sebagai pembanding, akan diuraikan sepuluh penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Empat Pilar MPR RI yang menjadi salah satu rujukan untuk melengkapi proses penyusunan penelitian ini. Mayoritas penelitian pembanding berupa jurnal penelitian dengan berbagai macam rumusan, tujuan, metode dan analisis yang berbeda. Berikut beberapa penelitian tersebut:

Pertama, penelitian dilakukan oleh Nina Angelia dengan judul “Pemahaman Penanaman Empat Pilar Kebangsaan terhadap Siswa SMA Negeri 4 Medan”. Penelitian diterbitkan oleh Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (JPPUMA), Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, Januari 2017. Penelitian ini untuk menjelaskan hubungan pemahaman Empat Pilar kebangsaan dengan sikap siswa menghadapi perkembangan zaman. Teori yang digunakan teori pemahaman Arikunto dan menggunakan metode penelitian deskriptif korelasional. Penelitian melibatkan 44 responden dengan empat klasifikasi pertanyaan tentang Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan informasi terkait Empat pilar.

Berdasarkan tujuh pertanyaan tentang Pancasila sebagai dasar negara, sebanyak 24 responden atau 56% siswa cenderung cukup paham dalam memahami pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya, hasil analisis data dari 10 pertanyaan tentang UUD 1945, sebanyak 27 responden atau 60% siswa cenderung cukup paham dalam memahami Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum Negara Republik Indonesia, konstitusi, hasil amandemen dan ketentuan tata cara perubahan UUD.

Berdasarkan sembilan pertanyaan tentang NKRI, sebanyak 28 responden atau 63% siswa cenderung cukup paham dalam memahami NKRI meliputi, pengertian negara, unsur-unsur terbentuknya negara, bentuk-bentuk negara dan sumber hukum negara.

Terakhir, hasil analisis data dari lima pertanyaan diketahui bahwa sebanyak 21 responden atau 57% siswa cenderung sangat setuju terhadap adanya informasi. Komunikasi dan teknologi dalam membantu siswa untuk mencari yang dibutuhkan siswa dan guru.

Penelitian kedua oleh Hastangka, Armaidly Armawi dan Kaelan, dengan judul “Empat Pilar MPR RI: Politik Bahasa dan Delegitimasi Makna Pancasila (Suatu Telaah Filsafat Bahasa)”. Penelitian menggunakan tinjauan filsafat bahasa berdasarkan teori *Speech Act* dari J.L Austin, teori Bertrand Russell tentang logika bahasa, analisis semiotika, serta analisis filosofis (ontologis, epistemologis, dan aksiologis) untuk menjelaskan kritik atas penggunaan istilah Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara sebagai persoalan aktual, konseptual, dan filosofis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, penggunaan istilah Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dengan mengkategorikan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pilar tidak tepat.

Kedua, penggunaan istilah 4 Pilar tidak dikenal dalam sejarah dan memori kolektif bangsa Indonesia untuk menyebut Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai bagian pilar. Ketiga, penggunaan istilah Empat Pilar oleh MPR RI merupakan kesalahan kategoris. Keempat, kegiatan sosialisasi Empat Pilar yang dilakukan justru mendelegitimasi makna Pancasila dan upaya pembodohan kepada masyarakat.

Ketiga, penelitian ditulis oleh Bagus Haryono, Edy Tri Sulistyono, dan Ahmad Zuber, dengan judul “Model Pendidikan Partisipatif Empat Pilar Bangsa Bagi Integrasi Nasional” yang dimuat dalam Jurnal Komunitas pada tahun 2013. Ada dua rumusan penelitian, pertama mengapa masyarakat akar rumput, yang dinilai rentan „dimanfaatkan“ oleh berbagai kepentingan (politik) justru tampak lebih dapat mengintegrasikan diri mereka? Kedua, cara dan bentuk partisipatif seperti apa yang dapat „mendidik“ diri mereka, sehingga dapat memiliki kemampuan internal untuk mengintegrasikan dirinya, sekalipun banyak kekuatan variabel pemicu yang sangat potensial mendisintegrasikan mereka?.

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model pendidikan partisipatif tentang Empat Pilar bangsa pada masyarakat akar rumput di Kampung Mbalong. Metode penelitian menggunakan metode Participatory Action Research (PAR) yaitu metode riset yang dilaksanakan secara partisipatif di antara warga masyarakat dalam suatu komunitas untuk menghubungkan proses penelitian ke dalam proses perubahan sosial. Teori yang digunakan teori Integrasi sosial yang dijelaskan dengan pendekatan integrasionis dari Horton dan Hunt (1989).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui gambar dan tulisan yang mereka tuangkan dalam media mural, mereka memahami isi Empat Pilar (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI), dan merepresentasikan pengamalan dan penghayatannya dalam kehidupan sehari-hari. Melalui mural, selain menjadikan tembok tampak terawat, terlihat bersih dan enak dipandang, juga dapat mengaktualisasikan pesan asimilasi alamiah di kampung Mbalong menjadi representasi bahwa mereka tidak lagi mempermasalahkan etnisitas, mampu mereduksi ikatan primordialisme, menguatkan persatuan, nasionalisme, dan mengokohkan integrasi nasional.

Penelitian keempat dilakukan oleh Budi Cahyanto, Holilulloh, M., dan Mona Adha dengan judul “Persepsi Masyarakat Terhadap Empat Pilar Kebangsaan di Kampung Agung Jaya Kecamatan Banjar Margo Tulang bawang Tahun 2013” yang diterbitkan dalam Jurnal Kultur Demokrasi. Penelitian ini untuk merumuskan sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Empat Pilar kebangsaan terutama Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika?

Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan dan menjelaskan persepsi masyarakat terhadap Empat Pilar kebangsaan di Kampung Agung Jaya Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang. Penelitian menggunakan metode deskriptif. Teori yang digunakan teori persepsi Kartini dalam Hastuti (2012:12). Dari hasil penelitian diketahui bahwa persepsi masyarakat terhadap Empat Pilar kebangsaan di Kampung Agung Jaya Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang kurang baik.

Berdasarkan data hasil sebaran angket kepada 51 responden dapat dijelaskan frekuensi nilai pada interval 44-48 (tidak baik) yaitu sebanyak 16 kepala keluarga atau 31,37% dari jumlah responden. Selanjutnya frekuensi nilai pada interval 49-53 (kurang baik) yaitu 27 kepala keluarga atau 52,94% dari jumlah responden. Selanjutnya frekuensi nilai pada interval 54-58 (baik) yaitu 8 kepala keluarga atau 15,69% dari jumlah responden.

Penelitian kelima dilakukan oleh Ongko Sasmita, I.G.N. Ardana M.Erg Cons. dan Tri Handoko, dengan judul “Perancangan Komik Sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa untuk Remaja”. Diterbitkan dalam Jurnal DKV Adiwarna tahun 2013. Rumusan penelitian, pertama bagaimana membawakan materi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa melalui media komik kepada remaja yang duduk di bangku SMP dan SMU? Kedua, bagaimana membuat media-media penunjang untuk promosi komik Empat Pilar Kehidupan?

Penelitian bertujuan agar remaja di Indonesia menjadi tahu pengertian dan paham pentingnya Empat Pilar tersebut, khususnya Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Di lain pihak, pemerintah dapat menggunakan media yang dihasilkan sebagai penunjang rangkaian program Sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Komik yang dibuat menyampaikan pesan-pesan Empat Pilar Kehidupan Berbangsa, namun dikemas dengan narasi dan gaya gambar yang menarik dan disukai remaja saat ini.

Berdasarkan pengamatan terhadap tren dan jenis cerita yang mau disampaikan, gaya gambar yang dipilih adalah *manga* dengan kategori *slice of life*. Strategi yang digunakan oleh perancang adalah berfokus pada dua pilar saja, yakni Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika yang lebih mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menyesuaikan dengan pembaca, perancang menyusun cerita berdasarkan kehidupan sehari-hari seorang remaja dan bagaimana kejadian-kejadian dalam kesehariannya ternyata dipengaruhi oleh Empat Pilar tersebut.

Karakter-karakter yang digunakan menggunakan *stereotype* remaja yang ada dan mewakili beberapa etnis serta agama agar bisa netral. Dari segi visual, yang dipilih adalah gaya gambar beraliran *manga* yang saat ini menjadi tren utama di kalangan remaja. Namun *manga* yang dipilih bukan yang bertipe imut atau *chibi*, melainkan cenderung semi realis karena tuntutan pesan yang mau dibawa. Distribusi komik ini berencana menyampaikan hasil perancangan ke pemerintah untuk selanjutnya dibagikan ke perpustakaan sekolah- sekolah.

Keenam, penelitian ditulis oleh Frenylia Shandi, Adelina hasyim, dan M. Mona Adha dengan judul “Hubungan Pemahaman Empat Pilar Kebangsaan dengan Sikap Siswa Menghadapi Arus Globalisasi” yang diterbitkan dalam jurnal Kultur Demokrasi tahun 2014. Penelitian keenam ini untuk menemukan hubungan pemahaman Empat Pilar kebangsaan dengan sikap siswa menghadapi arus globalisasi. Metode yang digunakan deskriptif korelasional dengan menggunakan teori pemahaman Arikunto.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui terdapat derajat keeratan, yaitu ada hubungan yang cukup erat pada pemahaman Empat Pilar kebangsaan dengan sikap siswa menghadapi arus globalisasi. Ketujuh, penelitian ditulis oleh Sarmini dan Warsono, dengan judul “Pendekatan Integratif-Komprehensif Dalam Pembudayaan Empat Pilar Kebangsaan Untuk Membangun Nasionalisme Generasi Muda di Sidoarjo Menuju generasi Indonesia 2025”.

Diterbitkan dalam prosiding Seminar Nasional Tahunan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan tahun 2017. Rumusan masalah: Bagaimana pembudayaan Empat Pilar Kebangsaan pada generasi muda melalui pendidikan? Tujuan penelitian: untuk menjelaskan tentang model pendekatan integratif - komprehensif dalam pembudayaan Empat Pilar kebangsaan dalam membangun nasionalisme untuk mempersiapkan generasi Indonesia Tahun 2025.

Metode penelitian yang digunakan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan teori pendekatan komprehensif Kirschenbaum (1995). Hasil penelitian, menunjukkan pertama, pendekatan komprehensif dalam pembudayaan Empat Pilar kebangsaan dalam kegiatan intrakurikuler. Dalam kegiatan belajar-mengajar di kelas, pembudayaan Empat Pilar kebangsaan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan terintegasi dalam semua mata pelajaran (*embeded approach*), khususnya untuk mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dan IPS. Kedua, model pembudayaan Empat Pilar Kebangsaan dilakukan secara integratif ke dalam kegiatan ekstrakurikuler.

Ketiga, model pembudayaan Empat Pilar Kebangsaan dilakukan secara integratif ke dalam kegiatan budaya sekolah. Keempat, model pembudayaan Empat Pilar Kebangsaan dilakukan secara integratif ke dalam sebuah bentuk partisipasi masyarakat. Nilai-nilai dalam Empat Pilar Kebangsaan ini akan dipaparkan dan disosialisasikan kepada masyarakat dengan mengundang komite sekolah, wali murid, dan tokoh masyarakat sekitar sekolah dalam sebuah rapat sehingga semua pihak yang berkompeten bisa terlibat langsung menyukseskan program ini. Kedelapan, penelitian ditulis oleh Hastangka, Armaidly Armawy, dan Kaelan dengan judul “Dampak Sosialisasi Empat Pilar MPR RI terhadap Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi”.

Diterbitkan dalam Jurnal *Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* tahun 2019. Rumusan masalah: Bagaimana cara pandang atau paradigma pemahaman dosen dan mahasiswa dalam memahami Pancasila sebagai dasar atau sebagai pilar, dan aspek kepastian dalam menjelaskan kedudukan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika? Tujuan penelitian: untuk mendeskripsikan dan menganalisis dampak Sosialisasi Empat Pilar MPR RI terhadap pemahaman Pancasila di perguruan tinggi dan untuk masyarakat terkait dengan pentingnya memahami Pancasila secara benar.

Data penelitian diambil dari buku, jurnal ilmiah, artikel surat kabar, dan berita di media *online* ataupun *offline*, dan dokumen yuridis, seperti peraturan perundang-undangan. Analisis data menggunakan pendekatan interpretatif, induksi-analitis, semiotik, dan analisis wacana.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama Sosialisasi Empat Pilar berdampak pada ambiguitas pemaknaan dan pemahaman baik dari peserta didik maupun dosen dalam pembelajaran Pancasila sebagai dasar atau pilar kehidupan bernegara dan berbangsa. Kedua, penggunaan istilah Empat Pilar telah mengacaukan pemahaman dan pengetahuan para peserta didik dalam memahami Pancasila.

Kesembilan, penelitian ditulis oleh Rialdo RM.L.Toruan, Radja Erland Hamzah, dan Aida Permata Sari dengan judul “Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan Humas MPR RI Melalui Kegiatan Sosial Budaya”. Rumusan masalah : Bagaimana pengemasan Sosialisasi Empat Pilar oleh Humas MPR RI di daerah? Tujuan penelitian: untuk mengetahui bagaimana Sosialisasi Empat Pilar kebangsaan oleh Humas MPR RI melalui sosial budaya. Metode penelitian: kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data ialah wawancara dan observasi.

Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hubungan Masyarakat dan Model Four Steps Cultip, Center & Broom. Hasil penelitian: Humas MPR RI dalam melaksanakan Sosialisasi Empat Pilar kebangsaan dengan mengemas unsur-unsur dan nilai melalui seni budaya yang disesuaikan dengan kondisi lokal sehingga mampu mengangkat kearifan lokal dan warisan para leluhur yang sejalan dengan falsafah hidup bangsa Indonesia.

Kesepuluh, penelitian ditulis oleh Apri Atika Sari dengan judul “Implementasi Empat Pilar Kebangsaan Dalam Pembentukan Karakter Santri di Pondok Pesantren Darul Ulum Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur”. Ada tiga rumusan masalah yaitu bagaimana implementasi, hambatan dan upaya mengatasi hambatan Implementasi Empat Pilar Kebangsaan dalam membentuk karakter santri di Pondok Pesantren? Penelitian bertujuan untuk mengetahui implementasi pilar kebangsaan dalam pembentukan karakter santri di Pondok Pesantren Darul „Ulum Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan hasil penelitian untuk mengimplementasikan Empat Pilar Kebangsaan dalam membentuk karakter santri dapat dilakukan langkah-langkah pembelajaran antara lain, 1) Implementasi kandungan nilai-nilai pancasila dipondok pesantren melalui penanaman nilai-nilai keiman santri dengan memberikan pembelajaran tentang ketauhidan, kajian tafsir-tafsir ayat al quran. 2) Implementasi kandungan nilai Undang-undang dasar 1945 pengajaran kepada santri agar patuh terhadap peraturan yang telah dibuat oleh pondok pesantren. 3) Implementasi kandungan NKRI melalui Pendidikan cinta tanah air melalui kegiatan keorganisasian yang di dalamnya terdapat tentang pemahaman terkait cinta tanah air. 4) Implementasi kandungan nilai Bhinneka Tungga Ika melalui cara tidak membeda-bedakan santri.

Dengan demikian dalam proses pembentukan karakter melalui Empat Pilar Kebangsaan dapat terealisasikan melalui kegiatan keagamaan, kegiatan ketertiban dan kegiatan pembelajaran. Untuk memperjelas kesepuluh penelitian terdahulu ini, maka akan dibuat dalam bentuk tabel:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti Judul Penelitian	Rumusan masalah Tujuan penelitian Metode penelitian	Teori yang Dipakai	Hasil Penelitian
1	Nina Angelia ”Pemahaman Penanaman Empat Pilar Kebangsaan terhadap Siswa SMA Negeri 4 Medan” JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA Program Studi Administrasi Publik,	Rumusan Masalah: Bagaimana hubungan pemahaman Empat Pilar kebangsaan dengan sikap siswa. Tujuan Penelitian: Untuk menjelaskan hubungan pemahaman Empat Pilar kebangsaan dengan sikap siswa menghadapi perkembangan zaman yang semakin berkembang	Teori Pemahaman Arikunto (2008:118)	<ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan hasil analisis data dari 7 pertanyaan yang diberikan kepada 44 responden diketahui bahwa sebanyak 24 responden (56%), siswa cenderung cukup paham dalam memahami pancasila sebagai dasar Negara. • Berdasarkan hasil analisis data dari 10 pertanyaan yang

	<p>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, Indonesia</p> <p>Januari 2017</p>	<p>Metode Penelitian: Deskriptif Korelasional</p>	<p>diberikan kepada 44 responden diperoleh data diketahui bahwa sebanyak 27 responden (60%) siswa cenderung cukup paham dalam memahami Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum Negara Republik Indonesia, Konstitusi, hasil amandemen dan ketentuan tatacara perubahan UUD.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan hasil analisis data dari 9 pertanyaan yang diberikan kepada 44 responden diketahui bahwa sebanyak 28 responden (63%), siswa cenderung cukup paham dalam memahami NKRI meliputi, pengertian negara, unsur-unsur terbentuknya Negara, bentuk-bentuk negara dan sumber hukum Negara. • Hasil analisis data dari 5 pertanyaan yang diberikan kepada 44 responden diketahui bahwa sebanyak 21 responden (57%) siswa dalam lingkup penelitian ini
--	--	---	---

				cenderung sangat setuju terhadap adanya informasi. Komunikasi dan teknologi dalam membantu siswa untuk mencari yang dibutuhkan siswa dan guru.
2	<p>Hastangka Armaidy, Armawi, dan Kaelan</p> <p>Empat Pilar MPR RI: Politik Bahasa dan Delegitimasi Makna Pancasila (Suatu Telaah Filsafat Bahasa)</p> <p>Jurnal Ilmiah <i>CIVIS</i>, Juli 2017</p>	<p>Rumusan Masalah:</p> <p>1. Bagaimana implikasi dari politik bahasa dalam penggunaan istilah kenegaraan seperti Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.</p> <p>2. Bagaimana penggunaan istilah 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara melalui kajian filsafati yang ditinjau dari perspektif Filsafat Bahasa</p> <p>Tujuan Penelitian:</p> <p>Untuk menganalisis terkait problem penggunaan istilah 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara atau 4 Pilar MPR RI yang menimbulkan banyak kritik dan pertentangan di masyarakat.</p> <p>Metode Penelitian:</p> <p>Menggunakan metode kualitatif</p>	<p>Penelitian menggunakan tinjauan filsafat bahasa berdasarkan teori <i>Speech Act</i> dari J.L Austin, teori Bertrand Russell tentang logika bahasa, analisis semiotika, serta analisis filosofis (ontologis, epistemologis, dan aksiologis) untuk menjelaskan kritik atas penggunaan istilah Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara sebagai persoalan aktual, konseptual, dan filosofis.</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan pertama, penggunaan istilah Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dengan mengkategorikan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pilar tidak tepat. Kedua, penggunaan istilah Empat Pilar tidak dikenal dalam sejarah dan memori kolektif bangsa Indonesia untuk menyebut Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai bagian pilar. Ketiga, penggunaan istilah Empat Pilar oleh MPR RI merupakan kesalahan kategoris. Keempat, kegiatan sosialisasi Empat Pilar yang dilakukan justru mendelegitimasi makna Pancasila dan upaya pembodohan kepada masyarakat.</p>

		dengan pendekatan filsafat analitika bahasa.		
3	<p>Bagus Haryono, Edy Tri Sulistyono, dan Ahmad Zuber</p> <p>Model Pendidikan Partisipatif Empat Pilar Bangsa Bagi Integrasi Nasional</p> <p>Jurnal Komunitas 2013</p>	<p>Rumusan penelitian:</p> <p>1. Mengapa masyarakat akar rumput, yang dinilai rentan „dimanfaatkan“ oleh berbagai kepentingan (politik) justru tampak lebih dapat mengintegrasikan diri mereka?</p> <p>2. Cara dan bentuk partisipatif seperti apa yang dapat „mendidik“ diri mereka, sehingga dapat memiliki kemampuan internal untuk mengintegrasikan dirinya, sekalipun banyak kekuatan variabel pemicu yang sangat potensial mendisintegrasikan mereka?</p> <p>Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model pendidikan partisipatif tentang Empat Pilar bangsa pada masyarakat akar rumput di Kampung Mbalong.</p> <p>Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode</p>	<p>Teori Integrasi sosial yang dijelaskan dengan pendekatan integrasionis dari Horton dan Hunt (1989)</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui gambar dan tulisan yang mereka tuangkan dalam media mural, penelitian menunjukkan bahwa mereka memahami isi 4 pilar bangsa (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI) dan merepresentasikan pengamalan dan penghayatannya dalam kehidupan sehari-hari.</p> <p>Melalui mural, selain menjadikan tembok tampak terawat, terlihat bersih dan enak dipandang, juga dapat mengaktualisasikan pesan asimilasi alamiah di kampung Mbalong menjadi representasi bahwa mereka tidak lagi mempermasalahkan etnisitas, mampu mereduksi ikatan primordialisme, menguatkan persatuan, nasionalisme, dan mengokohkan integrasi nasional</p>

		Participatory Action Research (PAR) yaitu metode riset yang dilaksanakan secara partisipatif di antara warga masyarakat dalam suatu komunitas untuk menghubungkan proses penelitian ke dalam proses perubahan sosial.		
4	Budi Cahyanto, Holilulloh, dan Mona Adha Persepsi Masyarakat Terhadap Empat Pilar Kebangsaan di Kampung Agung Jaya Kecamatan Banjar Margo Tulang bawang Tahun 2013 Jurnal Kultur Demokrasi (2013)	Rumusan penelitian: Sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Empat Pilar kebangsaan terutama pilar Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika? Tujuan: Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan persepsi masyarakat terhadap Empat Pilar kebangsaan di Kampung Agung Jaya Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang. Metode Penelitian: metode deskriptif	Teori persepsi Kartini dalam Hastuti (2012:12).	Hasil analisis data dapat diketahui bahwa persepsi masyarakat terhadap Empat Pilar kebangsaan di Kampung Agung Jaya Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang adalah kurang baik. Dengan rincian: Berdasarkan data hasil sebaran angket kepada 51 responden dapat dijelaskan frekuensi nilai pada interval 44-48 (tidak baik) yaitu sebanyak 16 kepala keluarga atau 31,37% dari jumlah responden. Selanjutnya frekuensi nilai pada interval 49-53 (kurang baik) yaitu 27 kepala keluarga atau 52,94% dari jumlah responden. Selanjutnya frekuensi nilai pada interval 54-58 (baik) yaitu 8 kepala keluarga atau 15,69% dari jumlah responden.
5	Ongko Sasmita, I.G.N. Ardana, M.Erg Cons., dan Tri	Rumusan penelitian: Bagaimana membawakan		Komik yang dibuat menyampaikan pesan-pesan Empat Pilar Kehidupan Berbangsa, namun dikemas dengan

	<p>Handoko</p> <p>Perancangan Komik Sosialisasi 4 Pilar Kehidupan Berbangsa untuk Remaja</p> <p>Desain Komunikasi Visual, Fakultas Seni dan Desain, Universitas Kristen Petra, Surabaya Jurnal DKV Adiwarna</p>	<p>materi 4 Pilar Kehidupan Berbangsa melalui media komik kepada remaja yang duduk di bangku SMP dan SMU ?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana membuat media-media penunjang untuk promosi komik 4 Pilar Kehidupan Berbangsa? <p>Tujuan penelitian:</p> <p>Remaja di Indonesia menjadi tahu pengertian dan paham pentingnya 4 Pilar tersebut, khususnya Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Di lain pihak, pemerintah dapat menggunakan media yang dihasilkan sebagai penunjang rangkaian program Sosialisasi 4 Pilar Kehidupan Berbangsa.</p> <p>Metode penelitian: Pendekatan kualitatif</p>	<p>narasi dan gaya gambar yang menarik dan disukai remaja saat ini. Berdasarkan pengamatan terhadap tren dan jenis cerita yang mau disampaikan, gaya gambar yang dipilih adalah <i>manga</i> dengan kategori <i>slice of life</i>. Strategi yang digunakan oleh perancang adalah berfokus pada 2 Pilar saja, yakni Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika yang lebih mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menyesuaikan dengan pembaca, perancang menyusun cerita berdasarkan kehidupan sehari-hari seorang remaja dan bagaimana kejadian-kejadian dalam kesehariannya ternyata dipengaruhi oleh 4 Pilar tersebut. Karakter-karakter yang digunakan menggunakan <i>stereotype</i> remaja yang ada dan mewakili beberapa etnis serta agama agar bisa netral.</p> <p>Dari segi visual, yang dipilih adalah gaya gambar beraliran <i>manga</i> yang saat ini menjadi tren utama di kalangan remaja. Namun <i>manga</i> yang dipilih bukan yang bertipe imut / <i>chibi</i>, melainkan cenderung ke semi realis karena tuntutan pesan yang mau dibawa. Distribusi komik ini berencana menyampaikan hasil</p>
--	---	--	--

				perancangan ke pemerintah untuk selanjutnya dibagikan ke perpustakaan sekolah-sekolah.
6	<p>Frenylia Shandi, Adelina hasyim, M. Mona Adha</p> <p>Hubungan Pemahaman Empat Pilar Kebangsaan dengan Sikap Siswa Menghadapi Arus Globalisasi</p> <p>Jurnal Kultur Demokrasi 2014</p>	<p>Rumusan penelitian:</p> <p>Bagaimana hubungan pemahaman Empat Pilar kebangsaan dengan sikap siswa menghadapi arus globalisasi</p> <p>Tujuan: Untuk menjelaskan hubungan pemahaman Empat Pilar Kebangsaan dengan sikap siswa menghadapi arus globalisasi.</p> <p>Metode penelitian: metode deskriptif korelasional.</p>	Teori pemahaman Arikunto (2008:118)	<p>Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa terdapat derajat keeratan, yaitu dengan koefisien kontigensi $C=0,54$ dan koefisien kontigensi $C_{maks}=0,82$. Artinya bahwa ada hubungan yang cukup erat pada pemahaman Empat Pilar kebangsaan dengan sikap siswa menghadapi arus globalisasi</p>
7	<p>Sarmini dan Warsono</p> <p>Pendekatan Integratif-Komprehensif Dalam Pembudayaan Empat Pilar Kebangsaan Untuk Membangun Nasionalisme Generasi Muda di Sidoarjo Menuju generasi Indonesia 2025.</p> <p>Prosiding</p>	<p>Rumusan masalah: Bagaimana pembudayaan Empat Pilar Kebangsaan pada generasi muda melalui pendidikan?</p> <p>Tujuan penelitian: Untuk menjelaskan tentang Model Pendekatan Integratif-Komprehensif dalam Pembudayaan Empat Pilar Kebangsaan dalam membangun nasionalisme untuk</p>	Teori pendekatan komprehensif Kirschenbaum (1995)	<p>1. Pendekatan Komprehensif dalam pembudayaan Empat Pilar kebangsaan dalam kegiatan intrakurikuler. Dalam kegiatan belajar-mengajar di kelas, pembudayaan Empat Pilar kebangsaan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan terintegrasi dalam semua mata pelajaran (<i>embedded approach</i>),</p>

	<p>Seminar Nasional Tahunan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan Tahun 2017</p>	<p>mempersiapkan generasi Indonesia Tahun 2025.</p> <p>Metode penelitian: Metode <i>Focus Group Discussion</i> (FGD)</p>		<p>khususnya untuk mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dan IPS.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Kedua, Model pembudayaan Empat Pilar kebangsaan dilakukan secara integratif ke dalam kegiatan ekstrakurikuler. 3. Ketiga, Model pembudayaan Empat Pilar Kebangsaan dilakukan secara integratif ke dalam kegiatan budaya sekolah. 4. Keempat, Model pembudayaan Empat Pilar kebangsaan dilakukan secara integratif ke dalam sebuah bentuk partisipasi masyarakat. Nilai-nilai dalam Empat Pilar kebangsaan ini akan dipaparkan dan disosialisasikan kepada masyarakat dengan mengundang komite sekolah, wali murid, dan tokoh masyarakat sekitar sekolah dalam sebuah rapat sehingga semua pihak yang berkompeten bisa terlibat langsung
--	--	--	--	--

				menyukseskan program ini
8	<p>Hastangka, Armaidly Armawy, dan Kaelan</p> <p>“Dampak Sosialisasi Empat Pilar MPR RI terhadap Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi”.</p> <p>Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan Tahun 2019 </p>	<p>Rumusan masalah: Bagaimana cara pandang atau paradigma pemahaman dosen dan mahasiswa dalam memahami Pancasila sebagai dasar atau sebagai pilar, dan aspek kepastian dalam menjelaskan kedudukan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika?</p> <p>Tujuan penelitian: Untuk mendeskripsikan dan menganalisis dampak Sosialisasi Empat Pilar MPR RI terhadap pemahaman Pancasila di perguruan tinggi dan untuk memberikan pemahaman pada masyarakat terkait dengan pentingnya memahami Pancasila secara benar.</p> <p>Metode penelitian: Mengambil data dari dari buku, jurnal ilmiah, artikel surat kabar, dan berita di media online ataupun offline, dan dokumen yuridis,</p>	<p>Analisis data menggunakan pendekatan interpretatif, induksi-analitis, semiotik, dan analisis wacana.</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Sosialisasi Empat Pilar berdampak pada ambiguitas pemaknaan dan pemahaman baik dari peserta didik maupun dosen dalam pembelajaran Pancasila sebagai dasar atau pilar kehidupan bernegara dan berbangsa, dan (2) penggunaan istilah Empat Pilar telah mengacaukan pemahaman dan pengetahuan para peserta didik dalam memahami Pancasila</p>

		seperti peraturan perundang-undangan.		
9	Rialdo RM.L. Toruan, Radja Erland Hamzah, dan Aida Permata “Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan Humas MPR RI Melalui Kegiatan Sosial Budaya”.	Rumusan masalah: Bagaimana pengemasan Sosialisasi Empat Pilar oleh Humas MPR RI di daerah? Tujuan penelitian: untuk mengetahui bagaimana Sosialisasi Empat Pilar kebangsaan oleh Humas MPR RI melalui sosial budaya. Metode penelitian: metode penelitian kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data ialah wawancara dan observasi	Teori Hubungan Masyarakat dan Model Four Steps Cultip, Center & Broom.	Humas MPR RI dalam melaksanakan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan dengan mengemas unsur-unsur dan nilai melalui seni budaya yang disesuaikan dengan kondisi lokal sehingga mampu mengangkat kearifan lokal dan warisan para leluhur yang sejalan dengan falsafah hidup bangsa Indonesia.
10	Apri Atika Sari “Implementasi Empat Pilar Kebangsaan Dalam Pembentukan Karakter Santri di Pondok Pesantren Darul Ulum Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur”	Rumusan masalah: 1) Bagaimana Implementasi Empat Pilar Kebangsaan dalam membentuk karakter santri di Pondok Pesantren? 2) Apa hambatan dalam Implementasi Empat Pilar Kebangsaan dalam membentuk karakter santri di Pondok Pesantren? 3) Apa upaya mengatasi hambatan Implementasi Empat Pilar Ke-	Teori Miles dan Huberman	Implementasi Empat Pilar Kebangsaan dalam membentuk karakter santri dapat dilakukan menggunakan langkah-langkah pembelajaran antara lain, 1) Implementasi kandungan nilai-nilai Pancasila dipondok pesantren melalui penanaman nilai-nilai keiman santri kami dengan memberikan pembelajaran tentang pembelajaran tentang ketauhidtan, kajian tafsir-tafsir ayat al

		<p>bangsaan dalam membentuk karakter santri di Pondok -Pesantren?</p> <p>Tujuan penelitian: Untuk mengetahui Implementasi Empat Pilar Kebangsaan Dalam Pembentukan Karakter Santri Di Pondok Pesantren Darul „Ulum Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.</p> <p>Metode penelitian: Menggunakan pendekatan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Darul Ulum Kecamatan Sekampung.</p>	<p>quran.</p> <p>2) Implementasi kandungan nilai Undang-undang dasar 1945 pengajaran kepada santri agar patuh terhadap peraturan yang telah dibuat oleh pondok pesantren.</p> <p>3) Implementasi kandungan NKRI melalui Pendidikan cinta tanah air melalui kegiatan keorganisasian yang di dalamnya terdapat tentang pemahaman terkait cinta tanah air.</p> <p>4) Implementasi kandungan nilai Bhinneka Tungga Ika melalui cara tidak membeda-bedakan santri. Dengan demikian dalam proses pembentukan karakter melalui Empat Pilar Kebangsaan dapat terealisasikan melalui kegiatan keagamaan, kegiatan ketertiban dan kegiatan pembelajaran.</p>
--	--	---	--

Positioning penelitian ini terhadap sepuluh penelitian terdahulu sebagai berikut: penelitian pertama yang ditulis Nina Angelia menjelaskan hubungan pemahaman Empat Pilar Kebangsaan dengan sikap siswa menghadapi Positioning. Positioning penelitian ini terhadap sepuluh penelitian terdahulu sebagai berikut: penelitian pertama yang ditulis Nina Angelia menjelaskan hubungan pemahaman Empat Pilar Kebangsaan dengan sikap siswa menghadapi perkembangan zaman dengan menggunakan teori pemahaman Arikunro.

Berbeda dengan penelitian ini yang lebih komprehensif karena selain ingin menemukan pemahaman peserta kegiatan Sosialisasi Empat Pilar RI, juga mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dengan menggunakan teori William Dunn. Pada penelitian kedua menekankan penelitian pada penggunaan istilah Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dari sudut pandang aktual, konseptual, dan filosofis. Dimana penggunaan istilah Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara atau Empat Pilar MPR RI sempat menimbulkan banyak kritik dan pertentangan di masyarakat. Maka, jika dibandingkan dengan penelitian tersebut penelitian ini lebih menganalisis apa yang terjadi di masyarakat terkait kegiatan Empat Pilar, tidak lagi membahas tataran ide.

Sehingga penelitian ini jelas memiliki kebaruan karena fokus untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI. Perbedaan penelitian ketiga dengan penelitian kali ini yaitu pada tingkat partisipasi masyarakat. Penelitian ketiga mengembangkan model pendidikan partisipatif tentang Empat Pilar pada masyarakat akar rumput melalui media seni mural. Tujuannya untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat yang direpresentasikan dalam bentuk gambar. Jadi masyarakat sebagai subjek tunggal penelitian yang terlibat langsung dalam proses penelitian.

Sedangkan penelitian kali ini melibatkan masyarakat sebagai pemberi informasi tentang keterlibatan mereka dalam kegiatan Sosialisasi Empat Pilar di dapil. Meskipun ada kesamaan arah penelitian yaitu mencoba menemukan tingkat pemahaman masyarakat melalui kegiatan Sosialisasi Empat Pilar di daerah pemilihan, namun ada perbedaan dalam pencarian data penelitian.

Penelitian keempat bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan persepsi masyarakat terhadap Empat Pilar Kebangsaan di Kampung Agung Jaya Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang. Sedangkan penelitian kali ini untuk mengevaluasi Kebijakan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor. Perbedaan keduanya cukup jelas yakni pada tujuan penelitian penelitian Budi Cahyanto dkk menekankan pada deskripsi dan persepsi, sedangkan penelitian ini pada evaluasi.

Penelitian kelima cukup unik. Ongko Sasmita, I.G.N. Ardana M.Erg Cons., dan Tri Handoko menjadikan komik sebagai media untuk menyampaikan pesan-pesan Empat Pilar Kehidupan Berbangsa, namun dikemas dengan narasi dan gaya gambar yang menarik dan disukai remaja saat ini. Tema komik berfokus pada dua pilar saja, yakni Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika yang menurut mereka lebih mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian tersebut bereksperimen dengan media baru untuk menyampaikan nilai-nilai Empat Pilar. Sedangkan penelitian kali ini untuk menemukan permasalahan yang ada dalam kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPRI RI di daerah pemilihan. Objek penelitian bukan kebaruan, namun penelitiannya yang menggunakan analisis evaluasi menjadikan penelitian ini kebaruan karena belum pernah dilakukan.

Penelitian keenam yang ditulis Frenyilia Shandi, Adelina Hasyim, dan M. Mona Adha bertujuan untuk menjelaskan hubungan pemahaman Empat Pilar kebangsaan dengan sikap siswa menghadapi arus globalisasi. Penelitian dalam jurnal ini mengambil sebagian kecil dari tujuan yang ingin penulis sampaikan dalam penelitian. Dimana penelitian kali ini tidak hanya tentang Empat Pilar dan relevansinya dengan arus globalisasi namun menyentuh aspek-aspek lain yang menjadikan Sosialisasi Empat Pilar itu penting dan perlu. Selain meneliti dampak dari kegiatan sosialisasi bagi peserta, juga mengevaluasi secara menyeluruh kegiatan Sosialisasi Empat Pilar di daerah pemilihan. Tidak hanya untuk siswa namun untuk warga yang pernah mengikuti kegiatan ini.

Ketujuh, penelitian Sarmini dan Warsono yang bertujuan untuk menjelaskan tentang model pendekatan integratif-komprehensif dalam pembudayaan Empat Pilar kebangsaan dalam membangun nasionalisme untuk mempersiapkan generasi Indonesia tahun 2025. Metode penelitian yang digunakan *Focus Group Discussion*. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian yang penulis lakukan untuk mengevaluasi Kebijakan Sosialisasi Empat Pilar dengan pendekatan teori William Dunn. Metode penelitian yang digunakan kualitatif deskriptif.

Penelitian kedelapan adalah penelitian kedua yang ditulis Hastangka, Armaidly Armawy, dan Kaelan yang jadi rujukan dalam penelitian ini. Penelitian tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis dampak Sosialisasi Empat Pilar MPR RI terhadap pemahaman Pancasila di perguruan tinggi dan untuk memberikan pemahaman pada masyarakat terkait dengan pentingnya memahami Pancasila secara benar. Ada kesamaan tujuan dengan penelitian kali ini yang juga ingin mengetahui dampak kegiatan Sosialisasi Empat Pilar, dengan objek berbeda yaitu masyarakat umum dan perguruan tinggi. Selain dampak penelitian ini juga untuk mengevaluasi secara keseluruhan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Anggota DPR RI dengan menggunakan teori William Dunn.

Penelitian kesembilan oleh Rialdo RM.L.Toruan dkk bertujuan untuk mengetahui bagaimana Sosialisasi Empat Pilar kebangsaan oleh Humas MPR RI melalui kegiatan sosial budaya. Berbagai metode sosialisasi Empat Pilar telah MPR rumuskan, pendekatan-pendekatan itu ditujukan demi efektifitas kegiatan. Sementara penelitian kali ini untuk mengevaluasi Kebijakan Empat Pilar yang dilakukan oleh Anggota DPR RI dengan tujuan mengetahui bagaimana pelaksanaan Program Sosialisasi Empat Pilar, dampak dari Program Sosialisasi Empat Pilar dan bagaimana Evaluasi Kebijakan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI oleh Anggota DPR RI di Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor dengan pendekatan teori William Dunn.

Penelitian kesepuluh yang ditulis Apri Atika Sari bertujuan untuk mengetahui Implementasi Pilar Kebangsaan Dalam Pembentukan Karakter Santri Di Pondok Pesantren Darul „Ulum Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur. Implementasi dan evaluasi adalah dua konsep yang berbeda. Konsep Implementasi menurut Meter dan Horn (1975) merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu institusi (pemerintah atau swasta) baik secara individu maupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan di dalam kebijakan. Wibawa (2005:16) menjelaskan bahwa kegiatan implementasi mulai berlangsung pada tahap penyusunan program hingga eksekusi program.

Sedangkan konsep Evaluasi adalah aktifitas periodik dimana kita ingin mengetahui dampak suatu kegiatan, program hingga kebijakan. Hasil dari kegiatan evaluasi tersebut berupa informasi yang akan digunakan untuk memperbaiki atau menghentikan kegiatan, program hingga kebijakan di periode mendatang.

Berdasarkan sepuluh penelitian terdahulu, maka dapat digambarkan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini lebih fokus untuk mengevaluasi kebijakan Sosialisasi Empat Pilar oleh anggota DPR RI yang diukur dengan enam tipe kriteria evaluasi berdasarkan teori William N Dunn yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Dengan analisis dan kajian serta penelaah tersebut di atas, inilah bentuk keterbaruannya, sehingga diharapkan dapat memberikan masukan terhadap MPR RI sebagai lembaga penyelenggara kegiatan sosialisasi ini serta pihak-pihak lain yang berkepentingan.

2.2 Kebijakan Publik

Kebijakan berasal dari bahasa Inggris yaitu *policy*, dan secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis artinya kota (*city*). Menurut Syafaruddin (2008:75) kebijakan disebut (*policy*) berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama sama diterima pemerintah/lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan, kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak (tentang perintah, organisasi, dan sebagainya).

Umumnya terdapat dua jenis kebijakan, yaitu kebijakan publik (*public policy*) dan kebijakan privat (*private policy*). Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan tertentu yang diimplementasikan guna memberikan perubahan lebih baik bagi masyarakat banyak.

Ada beberapa hal pokok yang terkandung dari kebijakan publik ini menurut James E. Anderson, yaitu: kebijakan publik memiliki tujuan yang berawal dari sebuah persoalan atau masalah, selanjutnya kebijakan publik melibatkan aksi dari pemerintah, dan kebijakan publik bisa memiliki makna positif jika dijalani oleh pemerintah dan negatif jika dibiarkan saja oleh pemerintah. Kebijakan privat biasanya dibuat oleh suatu lembaga milik perseorangan atau lembaga swasta milik organisasi tertentu yang hanya mengikat pada masyarakat tertentu pula (Sutapa, 2008: 13).

Pendapat lain disampaikan Leo Agustinus (2008:7), kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Wiliiam N. Dunn (2003:132) menyebutkan kebijakan publik (Public Policy) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Selanjutnya, Dunn (2003:132) juga menjelaskan pembuatan kebijakan publik melibatkan tiga elemen yaitu pelaku kebijakan, kebijakan publik dan lingkungan kebijakan yang semuanya saling terhubung dan terkait.

Widodo (2001:190) menyatakan kebijakan publik harus memenuhi unsur-unsur berikut yaitu kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu, kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah, kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan, kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai sesuatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu), dan kebijakan publik (positif), selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif).

Budi Winarno (2007: 32–34) menyebutkan tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan publik yaitu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi/ legitimasi kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan. Tahap-tahap ini dilakukan agar kebijakan yang dibuat dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Lima tahapan kebijakan juga dipaparkan oleh James Anderson (1979:23-24) yang diawali dengan formulasi masalah (*problem formulation*) untuk mengidentifikasi apa masalahnya? Apa yang membuat hal tersebut menjadi masalah kebijakan? Bagaimana masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah?. Kedua, formulasi kebijakan (*formulation*) untuk mengidentifikasi bagaimana mengembangkan pilihan- pilihan atau alternatif-alternatif untuk memecahkan masalah tersebut? Siapa saja yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan?. Ketiga, penentuan kebijakan (*adoption*) untuk mengidentifikasi bagaimana alternatif ditetapkan? Persyaratan atau kriteria seperti apa yang harus dipenuhi? Siapa yang akan melaksanakan kebijakan? Bagaimana proses atau strategi untuk melaksanakan kebijakan? Apa isi dari kebijakan yang telah ditetapkan. Keempat, implementasi (*implementation*) untuk menjawab pertanyaan siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan? Apa yang mereka kerjakan? Apa dampak dari isi kebijakan?. Terakhir, evaluasi (*Evaluation*) untuk mengidentifikasi bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan diukur? Siapa yang mengevaluasi kebijakan? Apa konsekuensi dari adanya evaluasi kebijakan?. Tidak berbeda dengan Winarno dan Andersen, William N Dunn juga membagi proses kebijakan ke dalam lima tahapan yaitu perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, monitoring dan evaluasi. Berikut tabel tahapan kebijakan Dunn:

Tabel 2.2
Tahap-tahap Kebijakan William N Dunn

TAHAP	KARAKTERISTIK
Perumusan masalah	Memberikan informasi mengenai kondisi- kondisi yang menimbulkan masalah
Forecasting (Peramalan)	Memberikan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari diterapkannya alternatif kebijakan, termasuk apabila tidak membuat kebijakan
Rekomendasi	Memberikan informasi mengenai manfaat bersih dari setiap alternatif dan merekomendasikan alternatif kebijakan yang memberikan manfaat bersih paling tinggi
Monitoring	Memberikan informasi mengenai konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan termasuk kendala-kendalanya.
Evaluasi	Memberikan informasi mengenai kinerja atau hasil dari suatu kebijakan

Berdasarkan beberapa definisi dan tahap kebijakan di atas, evaluasi ditempatkan pada akhir proses tahapan kebijakan. Kata evaluasi merupakan serapan dari bahasa Inggris “*evaluation*” yang berarti penilaian atau penaksiran (Echols dan Shadily, 2000 : 220). Kamus Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English menyebutkan pengertian evaluasi adalah *to find out, decide the amount or value* yang artinya suatu upaya untuk menentukan nilai atau jumlah.

Carol H. Weiss mendefinisikan evaluasi sebagai kata yang elastis yang dapat meluas meliputi penilaian kebenaran dan keberhasilan mengenai banyak hal. Weiss telah menegaskan bahwa semua penilaian itu merupakan penentuan keberhasilan kebijakan dari mulai pelaksanaan suatu program atau keputusan. Kenapa evaluasi perlu dilakukan? Ada dua tugas evaluasi kebijakan yang dijabarkan oleh Lester dan Stewert dalam Winarno (2008: 227) yaitu pertama untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan menggambarkan dampaknya, kedua adalah setelah mengetahui konsekuensi-konsekuensi kebijakan akan mengetahui apakah program yang dijalankan sudah sesuai atau tidak dengan dampak yang diinginkan.

Dalam Leo Agustino (2008:185) Lester dan Stewart juga menjelaskan bahwa evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan. Sedangkan William, N. Dunn dalam Nugroho (2014), istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pembagian angka (rating), dan penilaian (assessment).

Evaluasi berkenaan dengan menghasilkan informasi yang valid dan manfaat hasil kebijakan. Evaluasi dapat memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa valid kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah mampu diraih melalui tindakan dari kebijakan publik; memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan target; memberikan sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk juga perumusan masalah dan rekomendasi. Meskipun berkenaan dengan keseluruhan proses kebijakan, evaluasi lebih berkenaan dengan kinerja dari kebijakan, khususnya pada implementasi kebijakan.

Arikunto dan Cepi (2008:2) evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan.

Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak *decision maker* untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan. Parsons (2005) menekankan pentingnya studi evaluasi kebijakan karena hasil dari evaluasi akan menjadi penentu apakah program ataupun kebijakan itu dapat dilanjutkan atau tidak dilanjutkan. Oleh karena itu studi evaluasi kebijakan tidak dapat dilihat sebagai sesuatu prosedur formal biasa melainkan studi evaluasi harus dilakukan dengan penuh keseriusan dengan ukuran-ukuran yang telah ditetapkan.

Berikut sejumlah karakteristik evaluasi yang membedakan dari metode analisis kebijakan lainnya, yakni:

1. Fokus Nilai

Evaluasi dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari suatu kebijakan dan program. Evaluasi terutama merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program, dan bukan sekedar usaha mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi dan tidak terantisipasi. Kerena ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan dapat selalu dipertanyakan, evaluasi mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan-tujuan dan sasaran itu sendiri.

2. Interdependensi Fakta dan Nilai

Tuntutan evaluasi tergantung baik “fakta” maupun “nilai”. Untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi (atau rendah) diperlukan tidak hanya bahwa hasil-hasil kebijakan berharga bagi sejumlah individu, kelompok atau seluruh masyarakat; untuk menyatakan demikian, harus didukung oleh bukti bahwa hasil-hasil kebijakan secara actual merupakan konsekuensi dari aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Oleh karena itu, pemantauan merupakan prasyarat bagi evaluasi.

3. Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau

Tuntutan evaluatif, berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokatif, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil di masa depan. Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi-aksi dilakukan (*ex post*). Rekomendasi yang juga mencakup premis-premis nilai, bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi dilakukan (*ex ante*).

4. Dualitas Nilai

Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada (misalnya, kesehatan) dapat dianggap sebagai intristik (diperlukan bagi dirinya) ataupun ekstrinsik (diperlukan karena hal itu mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan lain). Nilai-nilai sering ditata di dalam suatu hirarki yang merefleksikan kepentingan relatif dan saling ketergantungan antar tujuan dan sasaran.

Secara garis besar, perbedaan evaluasi dengan penelitian lainnya terletak pada tahap akhir. Hasil evaluasi adalah keputusan, sedangkan hasil penelitian adalah kesimpulan. Manfaat positif akan diperoleh apabila evaluasi dijalankan dengan benar dan memperhatikan segenap aspek yang ada dalam suatu program. Menurut Dunn (2003:609-611), sejumlah fungsi utama evaluasi dalam analisis kebijakan, yakni:

1. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan.
2. Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Nilai juga dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepantasan tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju. Dalam menanyakan kepantasan tujuan dan sasaran, analisis dapat menguji alternatif sumber nilai (misalnya, kelompok kepentingan dan pegawai negeri, kelompok-kelompok klien) maupun landasan mereka dalam berbagai bentuk rasionalitas (teknis, ekonomi, legal, sosial, substantif).
3. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan dapat member sumbanagan pada perumusan ulang masalah kebijakan, sebagai contoh,

dengan menunjukkan bahwa tujuan dan target perlu didefinisikan ulang. Evaluasi dapat pula menyumbang pada definisi alternatif kebijakan yang baru atau revisi kebijakan dengan menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang diunggulkan sebelumnya perlu dihapus dan diganti dengan yang lain.

Dalam perkembangannya, evaluasi sangat diperlukan dalam melihat kinerja dari kebijakan/program itu sendiri, seperti yang diungkapkan oleh Samodra Wibawa (1994), bahwa evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi, yaitu sebagai berikut.

1. Eksplanasi; melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan.
2. Kepatuhan; melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan para pelaku, maupun pelaku lainnya, sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan
3. Audit; melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.
4. Akunting; dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial-ekonomi dari kebijakan tersebut.

Evaluasi merupakan cara untuk membuktikan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan dari suatu program, oleh karena itu pengertian evaluasi sering digunakan untuk menunjukkan tahapan siklus pengelolaan program yang mencakup, pertama tahap perencanaan (*ex-ante*). Pada tahap perencanaan, evaluasi sering digunakan untuk memilih dan menentukan prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Kedua, tahap pelaksanaan (*on-going*).

Pada tahap pelaksanaan, evaluasi digunakan untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan program dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Ketiga, tahap paska pelaksanaan (*ex-post*). Pada tahap paska pelaksanaan evaluasi ini diarahkan untuk melihat apakah pencapaian (keluaran/hasil/dampak) program. Evaluasi ini dilakukan setelah program berakhir untuk menilai relevansi (dampak dibandingkan masukan), efektivitas (hasil dibandingkan keluaran), kemanfaatan (dampak dibandingkan hasil), dan keberlanjutan (dampak dibandingkan dengan hasil dan keluaran) dari suatu program.

Untuk mengevaluasi sebuah kebijakan hendaknya memahami bentuk dan makna evaluasi kebijakan. Bentuk evaluasi kebijakan sangat bermacam-macam dan beragam sehingga mempengaruhi jenis dan model evaluasi. Penelitian ini akan memaparkan evaluasi dalam menggunakan tipe kriteria evaluasi William N Dunn (2003:429). Ada enam gambaran tipe kriteria yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan.

1. Efektifitas (*effectiveness*). Berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektifitas, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter.
2. Efisiensi (*efficiency*). Berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi adalah merupakan hubungan antara efektifitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter.
3. Kecukupan (*adequacy*). Berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.

4. Perataan (*equity*). Erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya (misalnya, unit pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha (misalnya biaya moneter) secara adil didistribusikan. Kebijakan yang dirancang untuk mendistribusikan pendapatan, kesempatan pendidikan, atau pelayanan pendidikan kadang-kadang didistribusikan atas dasar kriteria kesamaan. Kriteria kesamaan erat berhubungan dengan konsepsi yang saling bersaing, yaitu keadilan atau kewajaran dan terhadap konflik etis sekitar dasar yang memadai untuk mendistribusikan risoris masyarakat.
5. Responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya – efektifitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan – masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.
6. Ketepatan (*appropriateness*). Kriterion ketepatan secara dekat berhubungan dengan rasionalitas, substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.

Secara singkat kriteria evaluasi menurut Dunn, 2003:610 dapat digambarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3

Tipe Kriteria	Pertanyaan	Ilustrasi
Efektifitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?	Unit pelayanan.
Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?	Unit biaya, manfaat bersih, <i>ratio cost benefit</i> .
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?	Biaya tetap. Efektivitas tetap.
Perataan	Apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?	Kriteria Pareto. Kriteria Kaldor-Hicks, Kriteria Rawls.
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu?	Konsistensi dengan survei warga negara.
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?	Program publik harus merata dan efisien.

Kriteria Evaluasi William Dunn

Sumber : Sumber: William Dunn (2003)

Menurut Dunn, evaluasi kebijakan mempunyai dua aspek yang paling berhubungan, yaitu penggunaan berbagai macam metode untuk memantau hasil kebijakan publik dan program dan aplikasi serangkaian nilai untuk menentukan kegunaan hasil. Dunn selanjutnya membagi evaluasi kebijakan menjadi tiga berdasarkan waktu evaluasi, yaitu pada waktu pelaksanaan umumnya disebut pula sebagai evaluasi proses, sementara evaluasi setelah kebijakan diimplementasikan, disebut sebagai evaluasi konsekuensi (output) kebijakan atau evaluasi dampak pengaruh (outcome) kebijakan, atau disebut juga sebagai evaluasi sumatif. Dunn mengembangkan tiga pendekatan evaluasi implementasi kebijakan, yaitu evaluasi semu, evaluasi formal dan evaluasi keputusan teoritis.

Secara spesifik, Dunn (2003: 612-613) mengembangkan tiga pendekatan evaluasi implementasi kebijakan, yang tujuan, asumsi, dan bentuk-bentuk utamanya dilukiskan dalam tabel berikut:

Tabel 2.4
Pendekatan Evaluasi

Pendekatan	Tujuan	Asumsi	Bentuk-bentuk Utama
Evaluasi Semu	Menggunakan Metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid tentang hasil kebijakan	Ukuran manfaat atau nilai terbukti dengan sendirinya atau tidak kontroversial	Eksperimentasi sosial Akutansi sistem sosial Pemeriksaan sosial Sintesis riset dan Praktik
Evaluasi Formal	Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan secara formal diumumkan sebagai tujuan program kebijakan	Tujuan dan sasaran dari pengambil kebijakan dan administrator yang secara resmi diumumkan merupakan ukuran yang tepat dari manfaat atau nilai	-Evaluasi perkembangan -Evaluasi eksperimental -Evaluasi proses retrospektif -Evaluasi hasil retrospektif
Evaluasi keputusan teoritis	Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan yang secara eksplisit diinginkan oleh berbagai pelaku kebijakan	Tujuan dan sasaran dari berbagai pelaku yang diumumkan secara formal ataupun diam-diam merupakan ukuran yang tepat dari manfaat atau nilai.	Penilaian tentang dapat tidaknya dievaluasi Analisa utilities multiatribut

Penelitian ini menggunakan pendekatan evaluasi formal dimana pendekatan ini memiliki asumsi bahwa tujuan dan target yang telah ditetapkan secara formal merupakan ukuran yang paling tepat untuk mengevaluasi manfaat atau nilai suatu kebijakan.

2.3 Sosialisasi

Pengertian sosialisasi menurut Charles R Wright (Sutaryo:2004) adalah proses ketika individu mendapatkan kebudayaan kelompoknya dan menginternalisasikan sampai tingkat tertentu norma-norma sosialnya, sehingga membimbing orang tersebut untuk memperhitungkan harapan-harapan orang lain. Sedangkan Peter L Berger mengatakan sosialisasi merupakan proses dengan mana seseorang belajar menjadi anggota masyarakat.

Senada dengan itu, Charlotte Buchler mengatakan sosialisasi adalah proses yang membantu individu belajar dan menyesuaikan diri bagaimana cara hidup dan berpikir kelompoknya agar ia dapat berperan dan berfungsi dalam kelompoknya. Tidak jauh beda, Bruce J. Cohen berpendapat sosialisasi adalah proses manusia mempelajari tata cara kehidupan dalam masyarakat (*ways of life in society*), untuk memperoleh kepribadian dan membangun kapasitasnya sehingga dapat berfungsi dengan baik sebagai individu maupun sebagai anggota suatu kelompok.

Robert M.Z. Lawang, sosialisasi adalah proses mempelajari norma, nilai, peran dan semua persyaratan lainnya yang diperlukan untuk memungkinkan partisipasi yang efektif dalam kehidupan sosial. Mengutip Sutaryo, sosialisasi juga merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sebuah sistem pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya. Sosialisasi ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi dan kebudayaan dimana individu berada, selain itu juga ditentukan oleh interaksi pengalaman-pengalaman serta kepribadiannya.

Dari beberapa definisi sosialisasi tersebut bisa disimpulkan bahwa sosialisasi adalah proses belajar individu dengan lingkungannya untuk mempelajari norma, nilai sebagai cara untuk membentuk kepribadian. Ada interaksi antar individu dan kelompok-kelompok di masyarakat yang terhubung dalam sebuah sistem kemasyarakatan.

Jika dikaitkan dengan Program Empat Pilar MPR RI maka sosialisasi bisa dimaknai sebagai penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai-nilai dan aturan yang ada pada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, oleh para agen sosialisasi, bisa dari anggota DPR RI kepada masyarakat (peserta Sosialisasi Empat Pilar MPR RI), atau dari peserta kepada lingkungan terdekat mereka.

Ihromi (2004:32) membagi sosialisasi dalam dua tahapan yaitu Sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Sosialisasi primer adalah sosialisasi pertama yang dijalani oleh individu semasa kecil, dimana ia menjadi anggota masyarakat, dalam tahap ini proses sosialisasi primer membentuk kepribadian anak ke dalam dunia umum dan keluarga yang berperan sebagai agen sosialisasi. Sosialisasi sekunder didefinisikan sebagai proses berikutnya yang memperkenalkan individu yang telah disosialisasi ke dalam sektor baru dari dunia objektif masyarakatnya. Proses sosialisasi pada tahap ini mengarah pada terwujudnya sikap profesionalisme (dunia yang lebih khusus) dan dalam hal ini yang menjadi agen sosialisasi adalah lembaga pendidikan, peer group, lembaga pekerjaan, dan lingkungan yang lebih luas dari keluarga.

Dalam prosesnya, sosialisasasi memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan keterampilan kepada seseorang untuk dapat hidup bermasyarakat. Dengan memberikan sosialisasi kepada individu, maka individu tersebut pada akhirnya dapat dengan mudah belajar untuk bersosialisasi pada masyarakat, sehingga individu tersebut dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat.

2. Mengembangkan kemampuan seseorang dalam berkomunikasi secara efektif. Melalui sosialisasi, individu dapat dengan terbiasa untuk berkomunikasi dengan dunia luar dan masyarakat.
3. Mengembangkan fungsi-fungsi organik seseorang melalui introspeksi yang tepat. Dengan bersosialisasi, fungsi organik dalam tubuh/jiwa seseorang akan dapat terlatih dengan baik, sehingga individu tersebut dapat dengan mudah untuk berkumpul pada masyarakat. Serta, dengan komunikasi yang baik, maka individu tersebut dapat dengan mudah untuk hidup berdampingan di masyarakat.
4. Menanamkan nilai-nilai dan kepercayaan kepada seseorang yang mempunyai tugas pokok dalam masyarakat. Dengan sosialisasi, individu dapat dengan mudah untuk mendapatkan kepercayaan diri karena mereka memiliki komunikasi yang baik di masyarakat. Dengan adanya kepercayaan dan komunikasi tersebut maka individu dapat dengan mudah untuk bersosialisasi pada masyarakat.

Proses sosialisasi dipengaruhi berbagai faktor antara lain: apa yang disosialisasikan merupakan bentuk informasi yang akan diberikan kepada masyarakat berupa nilai-nilai, norma-norma dan peran? Bagaimana cara mensosialisasikan apakah melibatkan proses pembelajaran? Terakhir, siapa yang mensosialisasikan, institusi, media massa, individu atau kelompok? Sesuai dengan proses sosialisasi, program Sosialisasi Empat Pilar merupakan bentuk informasi termasuk nilai-nilai dan norma yang harus tetap dijaga oleh masyarakat.

Metode sosialisasi berupa seminar atau kegiatan yang mengumpulkan masyarakat untuk diberikan pemahaman mengenai materi sosialisasi. Sementara pihak-pihak yang melaksanakan atau melakukan sosialisasi disebut agen sosialisasi.

Terdapat empat agen sosialisasi yang utama, yaitu keluarga, kelompok bermain, media massa dan lembaga pendidikan sekolah. Akan tetapi media dalam proses sosialisasi merupakan sarana tambahan, sejalan dengan yang dikatakan Lane (Susanto:1992) bahwa dasar sosialisasi dalam keluarga dan peran media massa hanyalah bersifat tambahan.

Agen sosialisasi adalah peran utama dalam keberhasilan proses sosialisasi untuk menyebarkan atau menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang terletak dalam materi sosialisasi. Keberhasilan terdapat ditentukan oleh mekanisme yang terencana dan digambarkan dalam pola proses sosialisasi yang baik. Apabila proses-proses tersebut dapat tersusun maka penyebaran informasi mengenai materi sosialisasi dapat dengan tepat disampaikan pada sasaran sosialisasi. Agen sosialisasi dibutuhkan dalam penyerapan sebuah nilai-nilai yang ada dalam sebuah lingkungan atau komunitas. Sebab proses penanaman nilai-nilai tersebut tidak dapat dilakukan sendiri. Proses penyerapan membutuhkan sebuah perantara.

Anggota DPR RI yang diberikan mandat oleh MPR untuk mensosialisasikan Empat Pilar di dapil termasuk agen sosialisasi yang memiliki misi untuk menanamkan nilai-nilai yang lebih universal dan fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di masyarakat. Harapannya, masyarakat yang terlibat dalam Sosialisasi Empat Pilar akan menjadi agen sosialisasi yang mentransfer ilmu yang mereka dapatkan pada lingkungan sekitar sehingga proses sosialisasi menjadi efektif..

Penguatan agen sosialisasi melalui warga masyarakat bukan hal mudah. Walaupun Primus Yustisio memiliki mesin politik yang kuat melalui Baraya Primus Yustisio, untuk membantu proses sosialisasi menjadi lebih luas dan merata, tetap membutuhkan evaluasi menyeluruh.

2.4 Kerangka Berpikir

Pemaparan sebelumnya menyatakan masyarakat perlu mendapat dorongan untuk meningkatkan kesadaran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama nilai-nilai yang ada dalam Empat Pilar MPR RI. Penelitian ini menitikberatkan pada Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang dilakukan oleh Anggota DPR RI di Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor.

Untuk mengevaluasi kegiatan maka perlu diketahui substansi masalah untuk mendapatkan timbal balik yang sesuai dengan tujuan pelaksanaan program. Untuk mengidentifikasi masalah tersebut, penelitian ini menggunakan teori evaluasi dari William N. Dunn yang didasarkan pada enam indikator/kriteria yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan/perataan, responsifitas, dan ketepatan. Kerangka berpikir tersebut dipetakan dalam skema berikut:

Tabel 2.5
Kerangka Berpikir

